

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Proses demokrasi menjadi tren sebagai konsep bernegara yang ideal sesuai dengan kondisi faktual ditengah masyarakat, maka segala aktivitasnya tidak terlepas dengan peran pemerintah kepada masyarakat itu sendiri sebagai manifestasi esensi demokrasi yang berarti dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dari perspektif kenegaraan, demokrasi merupakan pilar dari berdirinya suatu negara sebagai bentuk pemerintah dan bentuk dari kepemimpinan yang berlandaskan kebaikan bersama yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri. Dari perspektif agama, rakyat dituntut berdaulat untuk dirinya dan bagi orang lain, asal tidak terlepas dari ajaran agama Islam walau di tengah arus perubahan sosial maupun budaya saat ini (Gatara, 2007).

Terdapat sejumlah persepsi mengenai dasar pembentukan partai politik baru tersebut, yakni: Pertama, munculnya partai baru itu merupakan pecahan partai lama yang diwarnai kekecewaan terhadap partai sebelumnya dengan gaya politik penguasa partai di dalamnya. Kedua, keyakinan yang terbentuk dari para aktor reformasi guna menunjukkan eksistensi diri sebagai *personal branding* yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mampu *struggle* di dalam politik dinamis. Ketiga, para politisi lama yang meyakini bahwa ia mampu memiliki basis massa yang jauh lebih kuat ketimbang masih berada di dalam partai yang lama (Tryatmoko, 2004).

Konsolidasi demokratis di dalam proses transisi tersebut banyak yang tidak menyadari bahwa peranan partai politik tidak bisa dilupakan begitu saja, sebab secara teoritis menunjukkan bahwa partai politik bisa menghidupkan demokrasi baik di dalam sistem pemerintahan maupun di luar pemerintahan sebagai basis oposisi yang memberikan otokritik terhadap pemerintah yang mampun mengonsolidasikan massa sebagai bentuk perhatian kepada demokrasi negara,

bahkan partai politik pun mampu menjadi lembaga demokrasi yang berpotensi “membunuh” demokrasi dengan cara obral janji atau menjadi lembaga yang melindungi *status quo*.

Dengan terdapatnya banyak partai politik yang ada di dalam suatu negara bisa menjadi citra dari kualitas demokrasi itu sendiri yang menunjukkan kekuatan maupun adaptabilitas dari sistem kepartaian yang dimiliki sebagai indikator seberapa kuat sistem kelembagaan yang dimiliki suatu partai. Hal ini menjadi tujuan untuk meninjau kemampuan dari partai yang mampu memobilisasi aspirasi warga yang sangat fleksibel dan kompleks dalam menghimpun aspirasi permasalahan masyarakat secara holistik, kemudian diimplementasikan menjadi suatu kebijakan politik guna menjawab permasalahan masyarakat.

Jika ditinjau dari perspektif sejarah, Indonesia dapat melihat kokoh atau tidaknya sistem kepartaian yang memang menunjang perjuangan kepentingan rakyat menjadi suatu indeks pembangunan politik yang mencakup kebijakan politik, komunikasi politik dengan beragam elemen partai politik maupun lembaga masyarakat, dan pendidikan politik kepada masyarakat (Asshiddiqie, 2005).

Dalam fungsinya, kebijakan politik dibentuk untuk menunjang kepentingan bersama yang menghimpun keberpihakan kepada rakyat, komunikasi politik sebagai artikulasi dari kepentingan partai politik untuk menunjang stabilitas maupun mendapatkan aspirasi masyarakat yang dimanifestasikan kepada kebijakan, dan pendidikan politik sebagai proses sosialisasi politik guna menyadarkan masyarakat akan fungsi partai politik bukan hanya berujung transaksional kepentingan semata, melainkan sebagai penampung aspirasi masyarakat juga baik sebelum pemilu maupun pasca pemilu.

Proses manifestasi nilai dasar yang terdapat pada masyarakat Indonesia tidak terlepas dari aktualisasi diri para tokoh bangsa yang mampu menginternalisasi antara proses keagamaan dan kebangsaan yang menjadi konsensus bersama dalam sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Pada akhirnya memang perlu terdapat

pengaderan khusus kepada masyarakat yang mampu melihat corak keberagaman budaya dan ideologi yang terdapat di setiap daerahnya (Suharto, 2009).

Masyarakat yang beradab akan mampu mereduksikan dirinya menjadi sebuah konstruksi politik yang mengikuti arus jaman, tanpa perlu melihat ada kepentingan atau tidak dibaliknya yang ada hanyalah proses mengaktualisasikan diri bagi kemaslahatan bersama, sesuai perintah yang terdapat pada ajaran Islam yakni manusia harus bermanfaat bagi manusia lainnya.

Peranan penting dari adanya partai politik yakni memperjuangkan nilai menyerap aspirasi masyarakat yang dituangkan menjadi pembangunan politik dari kekuasaan yang dimiliki baik dalam tataran eksekutif maupun legislatif. Salah satu yang menarik untuk ditelaah lebih secara komprehensif dari pembangunan politik ialah meninjau kebijakan publik yang dibentuk dari aspirasi masyarakat menjadi kemanfaatan bersama, ada juga komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap partai lain guna menstabilkan kondisi dinamika politik atau bisa juga kepada elemen masyarakat supaya bersinergi bersama guna membentuk integritas yang berkolaborasi dengan lembaga maupun kelompok masyarakat, ada juga segmentasi dari pendidikan politik yang dilakukan partai politik sebagai proses penyadaran masyarakat akan persepsi citra “buruk” terhadap politik yang perlu diberikan edukasi akan esensi politik yang baik itu seperti apa (Mas'oed, 2015).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai yang berlandaskan nilai keislaman yang dikenal sebagai implementasi nilai ukhuwah islamiyah dan menjadi konstruksi Islam yang memiliki spirit musyawarah mufakat untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan maupun kemasyarakatan, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 269 yang intinya membicarakan hikmah yang dimiliki untuk mendapatkan kebajikan. Di sini PKS memberikan manifestasi keislaman melalui nilai-nilai ketersalingan dan kebersamaan dalam melakukan upaya pembangunan politik melalui jalur birokrasi yang dimiliki.

PKS menjadi partai politik yang lahir setelah reformasi berlangsung untuk mampu memmanifestasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sosial politik

masyarakat Indonesia yang pada akhirnya mampu mengintegrasikan diri menjadi partai yang digandrungi masyarakat dikarenakan bukan hanya mengurus momentum politik saja, melainkan kebutuhan masyarakat dari primer hingga tersier pun diikhtirakan sebagai proses investasi politik untuk kepentingan yang bersifat politis.

Sebagai salah satu partai politik dari basis keislaman terbesar pun PKS memiliki visi berupa dakwah yang berusaha mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang berbasis pada kerukunan antar umat beserta kebangsaan, dari sini mampu terlihat peranan PKS yang berusaha mengarahkan para kader dan simpatisannya mampu mengimplementasikan asas-asas pembaharuan konsepsi politik yang berlandaskan Islam dengan memberikan pemberdayaan masyarakat supaya mampu terciptanya kebersamaan dalam perjuangan Islam.

Dari semangat melakukan pembaharuan konstruksi politik tersebut, PKS berusaha memberikan pengaruh secara substansi pada masyarakat akan kehadiran PKS dalam sendi kehidupan masyarakat yang pada akhirnya hal ini berdampak pada elektabilitas partai politik di masyarakat yang berusaha melindungi para *mustad'afin* (masyarakat tertindas), peduli pada isu-isu kemanusiaan yang berlandaskan keumatan, dan menjunjung tinggi asas perubahan berbasis pada agama Islam.

Kita bisa melihat secara empiris bahwa masyarakat kota Bandung dewasa ini sangat beradab dalam beragam hal yang salah satunya berkenaan terkait keagamaan, karena mengalami dampak langsung globalisasi teknologi yang memberikan kemudahan akses dalam mengarungi samudra kajian keilmuan berbasis keagamaan, maka hal ini menjadi suatu kesempatan besar bagi PKS yang notabene sebagai partai kaderisasi ideologis berbasis kajian keislaman atau biasa disebut holaqoh sebagai proses kaderisasi ideologis partai non struktural.

Masyarakat kota Bandung yang memang lebih banyak berada dalam kampung kota memang masih menjadi modal khusus bagi PKS sebagai salah satu partai politik terbesar di Kota Bandung yang memang mengalami fluktuasi atas fenomena

semakin merebaknya proses akulturasi ideologi yang dimanifestasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam dimensi sosio-kultur dengan pendekatan politik kolegial.

Di tengah arus reformasi yang memang membuka keran kebebasan berekspresi perlu diwadahi untuk memberdayakan masyarakat yang kritis terhadap perubahan sosial untuk menjadi sebuah pembangunan politik dari segi kemanfaatan umat, maka dengan hadirnya PKS di tengah-tengah kegelisahan umat mampu menjawab arah pola pembangunan politik ini akan dibawa ke mana.

Urgensi dari pembangunan politik yang ditinjau dari kebijakan yang dikeluarkan sebagai manifestasi menampung aspirasi masyarakat guna memberikan rasa kepercayaan kepada partai politik sebagai penyambung lidah rakyat di birokrasi. Komunikasi politik pun diperlukan bagi partai politik kepada masyarakat, partai politik lain, dan lembaga masyarakat lainnya untuk menyinergikan stabilitas politik yang dibangun demi kesinambungan pembangunan kota Bandung. Pendidikan politik pun sebagai dasar bagi partai politik untuk menunjang kesadaran politik masyarakat secara komprehensif.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Daerah Kota Bandung Tahun 2019 pun dijelaskan mengenai pembangunan berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, infrastruktur, dan teknologi sebagai basis pembangunan politik yang dilakukan daerah.

Dari Perwalkot (Peraturan Walikota) tersebut mengindikasikan bahwa program kerja daerah ini berkenaan peningkatan partisipasi politik sebagai landasan untuk menunjukkan pembangunan politik yang signifikan dengan mengadakan pendidikan politik bagi semua kalangan.

Kemudian dalam proses dinamika politik yang terjadi di kota Bandung pun membuat para partai politik menginginkan pembangunan politik yang dilakukannya sebagai langkah preventif apabila memenangkan kontestasi politik. Seperti yang dilakukan oleh PKS yang telah menjadi dinasti politik di kota Bandung

selama dua periode dalam membangun Jawa Barat khususnya di kota Bandung sebagai citra diri politiknya (Pikiran Rakyat, 2021).

Hal ini menjadi sebuah paradigma politik kebangsaan yang menjadi dasar pembangunan politik berbasis substansi politik Islam yang menjadi haluan politik PKS sebagai partai politik yang memiliki gerakan trans-nasional untuk membangun entitas yang sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai keislamannya.

Kepentingan dari suatu partai politik dalam memperjuangkan pembangunan politik sebagai basis pemberdayaan masyarakat sipil secara holistik. Terdapat beberapa alasan pembangunan politik dengan konsep pemberdayaan masyarakat untuk ditinjau, yakni sebagai berikut: Pertama, konsep pembangunan yang demikian sesuai kebutuhan masyarakat saat ini yang dimana masyarakat bersinergi dalam pembangunan. Kedua, pembangunan di suatu daerah bertujuan sebagai daerah yang unggul yang dilihat dari berdayanya masyarakat di suatu daerah.

Dengan hal yang menarik itulah menjadi dasar peneliti untuk terjun lebih dalam lagi melihat fenomena sosial politik yang terjadi dalam diri PKS di tengah masyarakat modern, maka peneliti berusaha merefleksikannya dalam skripsi ini dengan judul: **“Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pembangunan Politik di Kota Bandung”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa saja implementasi pembangunan politik dilihat dari program kerja pemerintah kota Bandung yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Bandung selaku *governance party* ?
2. Bagaimana DPD PKS Kota Bandung mengaktualisasikan regulasi yang telah dibentuk menjadi Perda untuk dilaksanakan di masyarakat?
3. Siapa saja yang terlibat pembangunan politik dalam melaksanakan RPJMD yang dituangkan ke dalam Perda Kota Bandung?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pembangunan politik dilihat dari program kerja pemerintah kota Bandung yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Bandung selaku *governance party*.
2. Untuk mengetahui DPD PKS Kota Bandung mengaktualisasikan regulasi yang telah dibentuk menjadi Perda untuk dilaksanakan di masyarakat.
3. Untuk mengetahui aktor yang terlibat pembangunan politik dalam melaksanakan RPJMD yang dituangkan ke dalam Perda Kota Bandung.

### 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

- 1) Kegunaan Akademis
  - a. Peneliti berharap tentang skripsi ini mampu memberikan sumbangsih bagi jurusan ilmu politik yang berkonsentrasi dalam bidang politik dalam negeri khususnya membahas dinamika partai politik yang berbasis keislaman.
  - b. Selain itu pun peneliti menginginkan skripsi ini mampu memberikan rujukan bagi peneliti lain untuk memberikan keluasan cara pandang yang khusus membahas PKS dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Kegunaan praksis
  - a. Mampu memberikan ruang yang lebih luas sesuai relevansi di lapangan yang diakomodir oleh skripsi ini sebagai rujukan bagi khalayak umum
  - b. Menjadi bagian penelitian yang bisa dikembangkan yang secara induktif mampu sesuai dengan prinsip dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri

### 1.5 Kerangka Berpikir

Seperti yang diketahui dalam penelitian harus ada kerangka pemikiran untuk berusaha mengomparasikan antara teoritik dengan realitas yang ada, supaya potensi maupun permasalahan mampu direfleksikan secara komparatif dan mampu diaktualisasikan ke dalam penelitian yang komprehensif.

Berdasarkan refleksi di atas pun peneliti berusaha merefleksikan secara komprehensif berkenaan sistem kepartaian maupun internal partai politik sesuai korelasi partai yang ada di Indonesia yang mampu memberikan sumbangsih pada masyarakat itu sendiri.

Secara perspektif sosial, partai politik diartikan sebagai lembaga non sektoral yang mampu memberikan dampak politis kepada pemerintah maupun non pemerintah baik selama berlangsungnya pemilu maupun pasca pemilu, hal ini didukung akibat adanya proses apatis yang berlangsung oleh partai politik khususnya para kader maupun simpatisan untuk mencegah hilangnya pendukung politiknya (Mufti, 2013).

Dalam kasus demokrasi liberal pun bisa menjadi *pressure group* (kelompok penekanan) yang menjadi dinamisator untuk mengorganisir masyarakat sipil melalui simpatisan maupun kader pada tataran bawah sebagai proses pemberdayaan masyarakat untuk turut andil mengkritisi kebijakan pemerintah atau mendukung kebijakan tersebut (Gatara, 2007).

Menurut Edmund Burke, partai politik adalah sebuah kumpulan yang berisi manusia-manusia yang peduli akan kepentingan nasional untuk membentuk kepentingan bersama sesuai prinsip yang telah disepakati untuk memenuhi kebutuhan yang menjaga stabilitas ekonomi maupun politik sesuai koridor kenegaraan yang berlaku tanpa menghilangkan substansi masyarakat sipil sebagai dinamisator *good governance*.

Menurut Sigmund Neuman (dalam Budiardjo, 2010), partai politik ialah lembaga yang terorganisir untuk menguasai lini sektor dalam pemerintah yang terintergrasi dalam aktivitas politik yang memperoleh simpati masyarakat maupun golongan berdasarkan akumulasi kepentingan bersama yang merepresentasikan tujuan rakyat.

Alan Ware (dalam Sahid, 2009) menginterpretasikan partai politik sebagai institusi yang mengorganisir kepentingan rakyat banyak yang berusaha mencapai tujuan bersama di dalam negara sesuai konstitusi yang berlaku. Dari segi legitimasi

pun dilihat untuk mencapai tujuannya secara komprehensif melalui sistem pemilu dan dijawantahkan dalam pemberdayaan masyarakat sesuai ideologi partai politik itu sendiri yang diyakini oleh anggota, kader, maupun simpatisan yang melebur diri dalam masyarakat umum.

Partai politik tidak terlepas dari karakteristiknya untuk menunjukkan substansi dari partai politik itu sendiri sebagai pembeda dengan lembaga lainnya. Untuk itu menurut Austin Ranney (dalam Sahid, 2009) dapat dibedakan cirinya menjadi:

1. Kelompok beridentitas
2. Masyarakat berideologis
3. Partai memberdayakan masyarakat
4. Partai terkoordinasi dengan pemerintah
5. Rekrutmen kader potensial jabatan tertentu

Menurut Burnell (dalam Gaffar, 2010) pembangunan politik merupakan manifestasi pembangunan institusi yang mewarisi nilai-nilai serta sikap untuk membentuk karakteristik kekuasaan politik di dalam suatu kepemimpinan terkait dalam memberikan kesan adanya pembangunan di dalam masyarakat oleh pemerintah yang berkuasa.

Pembangunan politik yakni sekumpulan struktur yang kompleks dengan memiliki proses menuju perubahan kebijakan politik dalam konteks secara luas untuk memperluas dari aspek modernisasi sosial-ekonomi masyarakat yang bertujuan mengubah masyarakat dari tradisional menuju dunia modern (Chilcote, 2016).

Pembangunan politik merupakan kajian politik yang memiliki pendekatan terhadap *developmentalism* sebagai manifestasi dari pembangunan suatu negara yang terstruktur, tersistematis, dan masif yang meninjau banyaknya fenomena politik yang diambil guna menentukan kebijakan publik sebagai langkah menunjang pembangunan itu sendiri (Warsito, 1999).

Di dalam konsep pembangunan politik ada beberapa konsep yang saling menghubungkan satu sama lain yaitu: perubahan, pembangunan, dan modernisasi politik sebagai manifestasi dari pembangunan masyarakat itu sendiri yang saling berkaitan satu sama lain (Gaffar, 2010). Karakteristik yang muncul di dalam perubahan politik bisa disebut sebagai manifestasi suatu sistem politik yang akan berubah menuju sistem politik lainnya sebagai penunjang pemerintahan dengan adanya pembangunan politik itu sendiri sebagai tujuan bernegara (Surbakti, 2010).

Menurut Huntington (dalam Haridison, 2013) konsep pembangunan politik bisa disebut memiliki segmentasi yang menunjang proses perubahan konfigurasi politik khususnya di negara berkembang yang metodenya pernah dipakai oleh negara maju untuk mengubah negaranya menjadi negara adidaya, yakni terdiri dari:

1. Geografis
2. Derivatif
3. Teologis
4. Fungsional

Menurut Lucian W. Pye (dalam Surbakti, 2010) Pembangunan politik adalah suatu perubahan politik terencana suatu kondisi ke kondisi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan melibatkan seluruh bagian dari masyarakatnya. Dijelaskan juga bahwa terdapat sepuluh aspek yang dapat diinterpretasikan sebagai *development syndrome* di antaranya pembangunan politik diartikan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi.
- 2) Pembangunan politik sebagai tipe politik dari masyarakat industri.
- 3) Pembangunan politik sebagai modernisasi politik.
- 4) Pembangunan politik sebagai operasi negara bangsa.
- 5) Pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum.
- 6) Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa.
- 7) Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi.

- 8) Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur.
- 9) Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan.
- 10) Pembangunan politik sebagai satu aspek proses perubahan sosial yang multidimensional

Dari konseptual yang dijabarkan di atas antara teori partai politik dan teori pembangunan politik sangat menunjang penelitian ini yang meninjau peran PKS sebagai *rolling party* yang memiliki kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif yang berimplikasi kepada pembangunan politik di kota Bandung itu sendiri.



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

